



Peran strategis kepolisian negara republik indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional

Dani Permana
Sesoimmen 65

Riwayat artikel :

Diterima 180825
Direvisi 180825
Disetujui 180825

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan stabilitas nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan negara. Dalam konteks ini, Polri memiliki peran signifikan tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung dan menjaga sistem ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan dalam pengawasan distribusi pangan, penindakan terhadap kejahatan pangan, pengamanan logistik, serta edukasi masyarakat melalui program Bhabinkamtibmas. Selain itu, Polri mendukung program strategis nasional seperti swasembada pangan dan Makanan Bergizi Gratis melalui pemanfaatan lahan, rekrutmen personel kompeten, dan pembentukan Satgas Pangan. Dengan demikian, peran Polri bersifat strategis dan multidimensi dalam penguatan ketahanan pangan nasional, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Kata kunci: Polri, ketahanan pangan, distribusi, penegakan hukum, swasembada pa



PENDAHULUAN

Krisis pangan merupakan tantangan global yang semakin mendalam dan kompleks, dengan dampak yang dirasakan di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, stabilitas sosial, dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia yang pesat, permintaan terhadap pangan juga meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,7 miliar orang, yang berarti kebutuhan pangan akan meningkat sekitar 60%. Hal ini memerlukan peningkatan produksi pangan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tantangan besar muncul karena sumber daya alam yang terbatas dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian akibat cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, serta perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi. Selain itu, degradasi lahan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mengurangi produktivitas pertanian global sebesar sekitar 21% sejak tahun 1961 (Cornell University, 2020). Dengan demikian, meskipun kebutuhan pangan meningkat, kemampuan untuk memenuhinya terbatas oleh faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis pangan global, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk peningkatan efisiensi produksi, pengurangan pemborosan pangan, serta adopsi teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia, melalui kebijakan Presiden, terus berupaya menjaga ketahanan pangan nasional agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Pada tahun 2021, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan.



Badan Pangan Nasional juga berperan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022–2024, Rencana Aksi Tahun 2023 disusun untuk memperkuat tata kelola sistem pangan nasional. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Beberapa fokus utama dalam rencana aksi ini antara lain penguatan kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi pangan, pengembangan kawasan pangan wilayah, cadangan pangan pemerintah, pengendalian food loss and waste, edukasi pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan pengentasan wilayah rawan pangan.

Badan Pangan Nasional mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dengan menjalankan program Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Program ini bertujuan untuk mengubah pola konsumsi pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti jagung, sagu, sorgum, dan talas. Pada tahun 2025, program ini telah menjangkau 800 titik lokasi di 50 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sinergi lintas sektor dengan TP PKK, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan perguruan tinggi untuk memperluas kampanye pangan lokal, baik secara luring maupun melalui media sosial.

Pemerintah mengembangkan kawasan Food Estate sebagai sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Program ini mencakup pengembangan kawasan pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui kerjasama antar petani dan penguatan kelembagaan kelompok tani (Indonesia.go.id, 2023).

Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sembilan komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea dan NPK. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan



distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional (<https://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id>, 2023).

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, terutama dalam konteks pengembangan kawasan Food Estate dan pembentukan korporasi petani. Sebagai institusi yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berperan aktif dalam mengawal kelancaran distribusi pangan, mencegah praktik ilegal seperti penimbunan atau penyelundupan bahan pangan, serta mengatasi segala bentuk gangguan yang dapat merusak kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di kawasan pertanian dan distribusi pangan, memastikan bahwa proses produksi dan distribusi berjalan dengan adil dan transparan, tanpa ada pengaruh dari kartel atau praktik monopoli yang merugikan petani maupun konsumen.

Pemerintah Indonesia, dalam menghadapi tantangan krisis pangan global, menyadari perlunya kebijakan yang terintegrasi dan adaptif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Program Food Estate, misalnya, bukan hanya tentang peningkatan luas lahan pertanian, tetapi juga tentang menciptakan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Selain itu, pengembangan korporasi petani menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan efisiensi dan meningkatkan daya saing petani di pasar global. Dalam konteks ini, Badan Pangan Nasional memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung ketersediaan pangan tetapi juga mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian pangan.

Selain kebijakan yang difokuskan pada peningkatan produksi pangan, pengelolaan distribusi pangan juga menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, peran Polri sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan distribusi



pangan yang adil, mengawasi keamanan pangan, serta memastikan bahwa program-program ketahanan pangan berjalan tanpa adanya hambatan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan sosial, Polri memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran distribusi pangan serta mengatasi potensi gangguan yang dapat merusak stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Melalui pengawasan distribusi pangan dan pencegahan terhadap praktik ilegal seperti penimbunan atau penyelundupan, Polri berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem pangan yang adil dan transparan. Tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, Polri juga terlibat langsung dalam penguatan ketahanan pangan dengan mendukung program-program produktif seperti penanaman jagung serentak, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional sekaligus memberdayakan petani lokal. Melalui sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai, yang pada gilirannya juga mendukung kestabilan sosial dan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global yang semakin kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith (2019) mengungkapkan bahwa perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan di negara berkembang, dengan dampak yang lebih parah di daerah yang bergantung pada pertanian subsisten. Temuan ini menunjukkan tantangan besar dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama dalam distribusi dan pengelolaan pangan yang stabil. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Polri memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran distribusi pangan dan pencegahan praktik ilegal yang dapat merusak kestabilan harga dan pasokan, sebagaimana disoroti oleh Johnson dan Patel (2020) yang menekankan pentingnya pengawasan pasar dalam menghadapi krisis pangan. Sehingga penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana posisi, tugas, dan kontribusi Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari keamanan nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana peran strategis Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional?
2. Apa saja bentuk keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu stabilitas pangan?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan tugasnya terkait penguatan ketahanan pangan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk:

1. Menganalisis bentuk-bentuk peran strategis yang dijalankan oleh Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2. Mengidentifikasi langkah-langkah preventif dan represif Polri dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan.
3. Menjelaskan tantangan institusional dan operasional yang dihadapi Polri dalam kontribusinya terhadap sektor ketahanan pangan.

Tinjauan Pustaka

1. Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Global

Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, terutama di negara-negara yang bergantung pada pertanian. Menurut Parry, Canziani, dan Palutikof (2021), perubahan iklim telah mengurangi hasil pertanian di banyak negara tropis, yang mengancam ketahanan pangan global. Mereka mencatat bahwa proyeksi perubahan suhu dan pola curah hujan yang tidak stabil berisiko mengurangi hasil panen, terutama untuk komoditas penting seperti gandum, jagung, dan padi. Sementara itu, Nelson et al. (2020) juga menekankan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap impor pangan, yang semakin memperburuk ketahanan pangan domestik.

Perubahan iklim telah menjadi tantangan signifikan bagi ketahanan pangan global. Studi oleh Ortiz-Bobea et al. (2020) menunjukkan bahwa perubahan iklim antropogenik telah mengurangi total faktor produktivitas pertanian global sekitar 21% sejak tahun 1961, setara dengan kehilangan sekitar tujuh tahun kemajuan



produktivitas pertanian. Selain itu, penelitian oleh Hasegawa et al. (2021) mengungkapkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan risiko kegagalan panen dan kelangkaan air, yang berdampak pada ketahanan pangan di berbagai wilayah.

2. Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, yang mencakup pengembangan kawasan pertanian dan peningkatan kemandirian pangan. Suryana (2022) menjelaskan bahwa kebijakan seperti *Food Estate* dan pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara sektor pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Rachman (2021) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama Indonesia adalah pengelolaan distribusi pangan yang efektif, yang sering terganggu oleh ketidakadilan dalam pasar dan praktik ilegal.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan, terutama terkait dengan kerawanan pangan di beberapa wilayah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengkoordinasikan kebijakan terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Namun, studi oleh Timisela et al. (2021) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam ketahanan pangan Indonesia pasca-COVID-19 meliputi fluktuasi harga pangan, peningkatan harga input, dan masalah kesehatan petani.

3. Peran Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Polri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam pengawasan distribusi pangan dan penegakan hukum terkait pangan. Nugroho (2021) menjelaskan bahwa Polri berfungsi sebagai pengawas distribusi pangan, mencegah penyelundupan, penimbunan, serta monopoli harga pangan yang merugikan petani dan konsumen. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi



antara Polri dan Kementerian Pertanian untuk memastikan proses distribusi yang transparan dan adil. Penelitian oleh Gunawan dan Nugroho (2020) menyoroti pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga terkait lainnya dalam menjaga kestabilan harga pangan dan mencegah praktik ilegal seperti penimbunan dan penyelundupan. Selain itu, Polri juga terlibat dalam program-program produktif seperti penanaman jagung serentak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan petani lokal.

4. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Sujatmiko (2021) menjelaskan bahwa dalam menghadapi krisis pangan, Polri tidak hanya berperan dalam pengawasan tetapi juga dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola konsumsi pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pangan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Studi oleh Purnomo (2021) menunjukkan bahwa sinergi antara Polri dan petani dalam program pertanian dapat meningkatkan hasil produksi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran strategis Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis peran institusi dan praktik-praktik kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan analisis normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan, dokumen kelembagaan, laporan kebijakan, serta data sekunder lainnya yang relevan dengan topik ketahanan pangan dan peran Polri.



3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer sekunder, berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan dokumen resmi dari Polri dan lembaga pemerintah terkait.
- b. Literatur ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, laporan lembaga penelitian, dan berita yang relevan mengenai keterlibatan Polri dalam pengawasan pangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan peran Polri dan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Observasi tidak langsung, melalui pelacakan berita, laporan kegiatan Polri, dan publikasi lembaga pemerintah sebagai bahan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan fungsi, tantangan, dan kontribusi Polri dalam sektor ketahanan pangan. Selain itu, dilakukan juga analisis normatif terhadap relevansi kebijakan dan peraturan yang mengatur peran Polri.

HASIL PENELITIAN

Peran strategis Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional

Sebagai lembaga yang memiliki jaringan hingga tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas, Polri memiliki mandat untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden yang tercermin dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Nasional, yang menggarisbawahi perlunya upaya kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dalam pasal 5, Perpres tersebut menegaskan bahwa "pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha



harus bersinergi dalam upaya menjaga ketahanan pangan melalui penguatan sistem distribusi, peningkatan produksi pangan, dan pengawasan harga pangan."

Polri, sebagai salah satu komponen utama dalam menjaga stabilitas sosial, diharapkan untuk mendukung kebijakan tersebut dengan berperan dalam pengawasan distribusi pangan, pengendalian harga, serta pemberdayaan petani dan masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk mengatasi tantangan krisis pangan, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidato dan kebijakan pemerintah menegaskan pentingnya peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu kebijakan penting yang ditekankan oleh Presiden adalah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah telah menetapkan berbagai program seperti swasembada pangan dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di seluruh negeri. Dalam hal ini, Polri mendapat mandat khusus untuk mendukung kebijakan tersebut dengan berperan aktif dalam pengawalan dan pengawasan distribusi pangan, mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, serta melakukan rekrutmen personel dengan keahlian di bidang pangan dan gizi. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, Polri menjalankan empat program strategis, yakni program pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan non-produktif, pengawasan distribusi pangan, dan rekrutmen Bintara dengan keahlian khusus di sektor pangan untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional (Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Ketahanan Pangan Nasional).

Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-79 Bhayangkara di Monas pada 1 Juli 2025, Presiden Prabowo secara khusus mengapresiasi kontribusi nyata Polri dalam mencapai rekor produksi jagung nasional yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ia juga memuji inisiatif Polri dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang mencakup pemberian makanan bergizi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Presiden menegaskan, "Ketahanan pangan adalah kunci keamanan suatu negara dan langkah strategis masa depan bangsa," dan mengingatkan Polri untuk "teruskan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat, dan selalu utamakan kepentingan rakyat di atas segalanya."



Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam aspek keamanan, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia, terutama dalam meningkatkan gizi dan ketahanan pangan (Pidato Presiden Prabowo Subianto, 2025).

Polri juga aktif dalam pendampingan dan penegakan hukum untuk mencegah penyelundupan, penimbunan, manipulasi harga, dan penyalahgunaan bahan pangan, sehingga turut menjaga stabilitas dan harga pangan nasional. Polri juga mendukung berbagai proyek strategis pemerintah, seperti pembangunan gudang pangan, program satu juta hektare jagung, dan pemberdayaan Bhabinkamtibmas sebagai agen transformasi ketahanan pangan di tingkat desa. Langkah-langkah ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang menempatkan Polri sebagai aktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, produksi, distribusi, dan peningkatan gizi bagi anak bangsa (Jukrah Rim Bakomsus Polri Program Ketahanan Pangan T.A. 2025).

Mendukung implementasi kebijakan ini, Polri mengeluarkan berbagai dokumen resmi seperti petunjuk teknis program ketahanan pangan Polri tahun 2025, Surat Arahan Kapolri, serta pedoman operasional di daerah yang diterapkan secara langsung di setiap Polda dan Polres. Dokumentasi ini termasuk program-program untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, pendampingan petani, serta pengawasan distribusi pangan yang dilaksanakan oleh jajaran Polri (Surat Arahan Kapolri, Nomor B/18415/XI/BIN.2.1/2024/SSDM).

Dokumen terkait Program Ketahanan Pangan Polri (Robinkar Polri, 2024) menunjukkan inisiatif strategis yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung kebijakan nasional swasembada pangan dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dilaksanakan melalui empat langkah utama:

- Pekarangan Pangan Bergizi:** Polri mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan tanaman bergizi, dengan Bhabinkamtibmas sebagai penggerak utama edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Pemanfaatan Lahan Produktif:** Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengelola lahan tidak terpakai (lahan tidur) dengan menanam



komoditas seperti jagung, singkong, ubi, serta mengembangkan kolam ikan dan peternakan.

3. **Pengawasan Distribusi Pangan:** Polri mengawasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di masyarakat.
4. **Rekrutmen Personel Khusus:** Polri membuka rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat guna mendukung program ketahanan pangan.

Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan dibentuk dan dioperasikan dari markas besar hingga ke tingkat polsek untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam mendukung program ketahanan pangan. Dengan membentuk jaringan yang kuat di setiap wilayah, Polri bertujuan untuk menggerakkan masyarakat, kelompok tani, dan relawan guna memaksimalkan hasil yang diinginkan. Selain itu, Polri juga mengadakan pelatihan virtual bertajuk "Polisi Penggerak Ketahanan Pangan," yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi personel Polri dalam mendukung program ketahanan pangan ini. Pelatihan tersebut bertujuan agar setiap anggota Polri yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar di lapangan.

Polri juga telah menjalin koordinasi yang erat dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar di tingkat akar rumput. Kolaborasi ini penting agar setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal di masing-masing daerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Harapannya, melalui upaya ini, ketahanan pangan nasional dapat tercapai dengan lebih mandiri dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. (Tribrata News Maluku, 2024).

Selain itu, Polri juga telah melaksanakan program menanam jagung sebagai bagian dari program strategis yang bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional



pada tahun 2025. Program ini menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 1 juta hektare dengan estimasi hasil panen antara 4 hingga 10 juta ton. Program penanaman jagung serentak ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Perhutani, dan masyarakat setempat. Kolaborasi antara Polri dan kementerian terkait diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan swasembada pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan seperti jagung. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan pengelolaan lahan secara lebih optimal (Tribrata News, 2024).

Hingga saat ini, sekitar 445,6 ribu hektare lahan siap tanam, sementara 922,7 ribu hektare lahan perhutanan sosial masih dalam tahap verifikasi untuk penanaman jagung. Polri tidak hanya bertanggung jawab dalam proses penanaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk dan mengaktifkan kelompok tani di berbagai wilayah. Dalam pelaksanaannya, Polri membantu penyusunan proposal untuk memperoleh bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan memberikan pendampingan teknis untuk memastikan percepatan penanaman jagung. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terlibat langsung dalam penanaman jagung serentak di berbagai daerah, seperti Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan adanya dukungan alat, benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian, Polri menargetkan agar produktivitas jagung petani dapat meningkat signifikan, dengan hasil panen mencapai 18 hingga 20 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 5 ton per hektare (Tribrata News, 2024). Program ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga untuk memastikan distribusi pupuk dan bahan pertanian lainnya dilakukan dengan tepat guna, menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Hingga pertengahan tahun 2025, program ketahanan pangan Polri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Salah satu pencapaian utama adalah pelaksanaan panen raya jagung serentak pada kuartal I dan II tahun 2025, yang berhasil menghasilkan panen antara 2,08 hingga 2,5 juta ton jagung. Ini merupakan bagian dari upaya besar Polri untuk memenuhi target penanaman jagung di



lahan seluas 1 juta hektare pada akhir tahun 2025. Pada pertengahan tahun 2025, Polri bersama dengan Kementerian Pertanian dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah berhasil menanam jagung di sekitar 429 ribu hektare lahan, yang diharapkan dapat menghasilkan panen hingga 4 hingga 10 juta ton jagung pada akhir tahun. Keberhasilan ini menandakan capaian yang baik dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk komoditas jagung (Tribrata News, 2025).

Selain itu, Polri telah merekrut 593 personel Bintara Kompetensi Khusus yang memiliki keahlian di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan gizi untuk mendukung program ketahanan pangan. Personel ini bertugas untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas serta personel lainnya sebagai penggerak utama program ketahanan pangan di lapangan. Polri juga fokus pada penguatan distribusi dan penyimpanan hasil panen dengan membangun 18 gudang pangan di 12 provinsi, yang bertujuan untuk menampung ribuan ton bahan pangan dan mempermudah akses distribusi pangan ke masyarakat. Selain itu, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri aktif membentuk dan menggerakkan lebih dari 135.000 kelompok tani serta memberikan pendampingan teknis guna meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas pangan nasional. Polri juga berperan dalam menjaga harga pembelian pangan agar tetap stabil, melindungi petani dari praktik spekulasi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan peran strategis Polri sebagai fasilitator, pengawas, dan pelaksana program ketahanan pangan yang mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan pemangku kebijakan terkait (Tribrata News, 2025).

Bentuk keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu stabilitas pangan

Keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu stabilitas pangan sangat strategis dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu peran utama Polri adalah dalam Pengawasan Distribusi Pangan, di mana Polri memastikan rantai distribusi pangan berjalan lancar dan efisien, tanpa hambatan yang dapat merugikan masyarakat. Polri juga berperan aktif dalam mengawasi ketersediaan bahan pangan agar tidak terjadi kelangkaan, yang bisa



memicu inflasi pangan dan ketidakstabilan sosial. Hal ini sangat penting terutama pada masa-masa kritis seperti musim panen dan musim kering yang mempengaruhi produksi pangan nasional (Tribrata News, 2025).

Polri juga melakukan Penindakan Hukum terhadap Pelanggaran Pangan yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyelundupan pangan ilegal, penimbunan, manipulasi harga, penyalahgunaan bahan pangan berbahaya, pemalsuan produk, dan praktik spekulasi yang dapat menyebabkan kelangkaan dan fluktuasi harga pangan. Contoh nyata dari penegakan hukum ini adalah tindakan terhadap penyelewengan produk MinyaKita (minyak goreng bersubsidi), yang diikuti dengan penetapan tersangka dan penyidikan aktif oleh Bareskrim dan jajaran Polda/Polres. Selain itu, Polri juga terlibat dalam Pencegahan Mafia Pupuk dan Penipuan Pertanian, berperan sebagai benteng dalam mengawal keamanan distribusi pupuk dan mencegah praktik mafia pupuk, penipuan, serta pencurian yang merugikan petani. Hal ini bertujuan agar program ketahanan pangan dapat berjalan tanpa hambatan dan memastikan distribusi pupuk yang adil bagi petani (Kemenpan RB, 2025).

Selain pengawasan dan penegakan hukum, Polri juga melakukan Pengawasan Harga Sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk memastikan harga bahan pokok, seperti beras dan sembako lainnya, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terutama berlaku selama periode penting, seperti Ramadan, di mana permintaan pangan cenderung meningkat, dan spekulan dapat memanfaatkan kondisi ini untuk memainkan harga. Polri bertindak tegas dengan menindak para spekulan yang mencoba menggelembungkan harga pangan. Dalam mendukung stabilitas pangan lebih lanjut, Polri membentuk dan mengoperasikan Satgas Pangan yang fokus pada pengawasan, monitoring, dan penindakan pelanggaran di sektor pangan di seluruh Indonesia. Satgas ini menjadi ujung tombak dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang diluncurkan oleh pemerintah (Tribrata News, 2025).

Polri juga aktif dalam Edukasi dan Penyuluhan, bekerja sama dengan petani dan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan pangan, efisiensi, dan keamanan distribusi pangan. Polri menyelenggarakan dialog publik, seminar, dan berbagai bentuk sosialisasi guna memastikan bahwa masyarakat dan petani memahami



pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dan mematuhi peraturan yang ada (Antara News, 2025). Secara keseluruhan, Polri bertindak mulai dari pengawasan hulu hingga hilir di sektor pangan, termasuk memberikan proteksi hukum yang ketat terhadap pelaku kejahatan pangan, untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.

Penegakan hukum Polri di bidang pangan sepanjang tahun 2025 menunjukkan peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan menindak pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Beberapa capaian utama dalam penegakan hukum pangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pengungkapan Kasus Praktik Curang Penjualan Beras:** Polri berhasil mengungkap kasus praktik curang dalam penjualan beras yang berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp99,35 triliun. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan dengan penetapan tersangka, didukung oleh pasal-pasal perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang yang memberikan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Kasus ini merupakan salah satu yang terbesar di sektor pangan dan menunjukkan komitmen Polri dalam menanggulangi kejahatan pangan yang dapat merusak kestabilan ekonomi negara (Tributanews Polda Maluku, 2025)
- Penindakan terhadap Penyimpangan Minyak Goreng (MinyaKita):** Polri secara aktif menindak penyalahgunaan produk MinyaKita, termasuk kasus harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pengemasan ulang yang tidak sesuai takaran. Hingga Maret 2025, Satgas Pangan Polri menerima 12 laporan polisi dan menetapkan 11 tersangka dari berbagai daerah yang kini sedang dalam proses penyidikan oleh Bareskrim dan Polda/Polres terkait penyimpangan harga dan kemasan. Penindakan ini bertujuan untuk menjaga akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang bergantung pada subsidi minyak goreng (Metrotvnews, 2025).
- Pengawasan dan Penindakan terhadap Mafia Pupuk dan Distribusi Pangan:** Polri melaksanakan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan bahan pangan serta penegakan hukum terhadap mafia pupuk dan praktik curang lainnya yang



merugikan petani dan masyarakat. Polri juga memastikan bahwa harga bahan pangan pokok tetap sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, serta menindak tegas spekulan yang berusaha meraup keuntungan dari fluktuasi harga yang merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan peran penting Polri dalam menjaga kestabilan harga pangan dan keberlangsungan distribusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Metrotvnews, 2025).

4. **Pembentukan Satgas Pangan:** Sebagai bagian dari upaya strategis dalam mengawasi sektor pangan, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang bertugas memantau distribusi pangan, ketersediaan bahan pangan, dan menindak pelanggaran yang terjadi di sektor ini di seluruh wilayah Indonesia. Satgas ini berfokus pada pengawasan yang komprehensif untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan memastikan keamanan pangan di Masyarakat (Robinkar Polri, 2024).
5. **Efek Jera dan Kolaborasi:** Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang merugikan masyarakat serta mendorong bisnis pangan yang adil dan transparan. Polri juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, guna menjaga keamanan pangan demi mencapai tujuan nasional Indonesia Emas 2045, yaitu ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan (Satgas Pangan Polri, 2025)
6. **Pengakuan dan Penghargaan:** Peran Polri dalam penegakan hukum di sektor pangan turut diapresiasi oleh pengamatetahanan pangan nasional Brigjen Pol (Purn) Faisal Abdul Naser yang menjabat sebagai Chairman Executive Liaison Staff PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. dan pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi dan keamanan pangan nasional. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Polri telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan konsisten dalam menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi kepentingan Masyarakat (Antara News, 2025).

Penegakan hukum oleh Polri di bidang pangan pada tahun 2025 mencerminkan upaya yang komprehensif dan strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Keberhasilan Polri dalam mengungkap praktik curang penjualan beras, penyimpangan



produk minyak goreng, serta penindakan terhadap mafia pupuk menunjukkan komitmen Polri dalam menanggulangi kejahatan yang mengganggu sektor pangan. Kasus-kasus yang diungkap, seperti praktik penimbunan dan manipulasi harga, bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi, terutama di masa-masa krisis pangan. Dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk untuk fokus pada pengawasan distribusi pangan, Polri dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang terkait dengan distribusi pangan, baik itu dalam hal harga maupun ketersediaannya, dapat berjalan dengan transparan dan adil. Penindakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak hanya terbatas pada sektor keamanan, tetapi juga berfokus pada menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Polri, melalui berbagai pendekatan hukum yang tegas, juga berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berupaya merusak integritas pasar pangan. Melalui pendirian Satgas Pangan dan peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk, Polri tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat. Kolaborasi yang terjalin antara Polri, Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor pangan bukanlah tanggung jawab Polri semata, tetapi merupakan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pangan yang aman dan efisien. Seiring dengan target pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan yang mandiri pada tahun 2045, keberhasilan Polri dalam menjaga stabilitas pangan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan pangan global dengan kekuatan dan ketahanan yang lebih besar. Dalam konteks ini, penegakan hukum oleh Polri menjadi pilar yang tidak hanya menjaga keadilan sosial, tetapi juga menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tantangan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan tugasnya terkait penguatan ketahanan pangan di Indonesia

Tantangan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan tugas terkait penguatan ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2025 sangat kompleks dan multidimensional, meliputi



berbagai aspek yang memerlukan strategi terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah distribusi pangan yang timpan dan akses yang sulit, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Polri memiliki tugas untuk memastikan bahwa pasokan pangan dapat sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau tanpa hambatan, agar tidak terjadi kelangkaan pangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, distribusi pangan yang tidak merata dapat memicu ketimpangan harga di berbagai wilayah, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil.

Tantangan lain yang dihadapi Polri terkait ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian, seperti untuk perumahan atau industri, mengurangi area tanam yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Ini berdampak pada target pemerintah untuk menanam jagung di lahan seluas 1 juta hektare pada tahun 2025. Polri, dalam hal ini, berperan dalam mengawal kebijakan penggunaan lahan dan memastikan bahwa alih fungsi lahan tidak mengganggu ketersediaan bahan pangan yang vital bagi kebutuhan domestik. Penegakan hukum terkait konversi lahan yang ilegal menjadi tugas penting bagi Polri dalam upaya memastikan keberlanjutan produksi pangan di Indonesia.

Selanjutnya, Polri juga menghadapi masalah serius terkait penindakan kejahatan pangan yang terus muncul. Praktik penyelundupan pangan ilegal, penimbunan, manipulasi harga, pemalsuan produk, dan mafia pupuk menjadi masalah yang sering kali mengganggu kestabilan pasokan dan harga pangan. Penindakan terhadap kasus-kasus ini memerlukan koordinasi yang erat antara Polri dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Pertanian dan Polda/Polres di daerah. Selain itu, penegakan hukum di sektor pangan ini menuntut sumber daya yang optimal serta pendekatan yang tepat guna mengatasi praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan merusak ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, perubahan iklim dan krisis global juga menjadi tantangan besar bagi Polri dalam pengelolaan ketahanan pangan Indonesia. Dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem dan ketidakpastian dalam produksi pangan global memperburuk situasi yang sudah penuh tantangan. Polri tidak hanya harus berfokus pada



pengawasan dan penegakan hukum dalam negeri, tetapi juga harus memahami dinamika global yang mempengaruhi kestabilan pasokan pangan. Misalnya, fluktuasi harga pangan global yang dipengaruhi oleh bencana alam atau krisis internasional dapat langsung berdampak pada Indonesia, mengingat ketergantungan pada impor pangan tertentu.

Selain itu, lemahnya posisi tawar petani sering kali menjadi kendala dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal. Petani sebagai ujung tombak produksi pangan sering kali kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang adil, karena harga jual yang rendah dan biaya produksi yang tinggi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani, serta membantu mereka melalui pendampingan teknis dan advokasi agar mereka dapat mengoptimalkan hasil panen dengan harga yang layak. Perlindungan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa petani bisa bertahan dan berkontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan nasional.

Terakhir, tantangan besar yang dihadapi Polri adalah koordinasi multi sektor yang kompleks. Penguatan ketahanan pangan memerlukan sinergi yang erat antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta masyarakat. Polri harus mengelola komunikasi dan kerjasama yang efektif di berbagai level agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan, yang memerlukan pendekatan holistik mulai dari pencegahan, edukasi, perlindungan, hingga pengawasan distribusi pangan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa peran Polri dalam penguatan ketahanan pangan bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih luas dan integratif, mencakup berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Polri harus terus beradaptasi dengan dinamika yang ada dan berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan cara yang komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tidak hanya dalam aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai



pelaksana program-program produktif nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan distribusi pangan, penindakan terhadap kejadian pangan seperti penimbunan, penyelundupan, hingga pemalsuan produk, serta edukasi kepada masyarakat dan petani.

Polri juga menjalankan berbagai program nasional seperti penanaman jagung serentak, pengawasan pupuk bersubsidi, dan pemberdayaan personel Bhabinkamtibmas sebagai penggerak ketahanan pangan di tingkat desa. Melalui koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, Polri berhasil membangun ekosistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, Polri menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi pangan yang tidak merata, alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta lemahnya posisi tawar petani. Oleh karena itu, peran Polri perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang terintegrasi, peningkatan kompetensi personel, serta sinergi yang lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025). *Polri Edukasi Petani dan Masyarakat Jaga Ketahanan Pangan*.
- Cornell University. (2020). *Climate Change Effects on Global Agriculture*.
- Gunawan, R., & Nugroho, A. (2020). *Sinergi Polri dan Kementerian dalam Menjaga Harga Pangan*. Jakarta: Pusat Kajian Ketahanan Nasional.
- Hasegawa, T., Fujimori, S., Takahashi, K., & Masui, T. (2021). *Risk of food insecurity under climate change*. *Environmental Research Letters*, 16(1), 014009.
- Indonesia.go.id. (2023). *Pengembangan Kawasan Food Estate Nasional*.
- Johnson, T., & Patel, D. (2020). *Food Markets and Regulation in Crisis*. Oxford: Food Policy Press.
- Kemenpan RB. (2025). *Penegakan Hukum Polri di Sektor Pangan Nasional*.
- Metrotvnews. (2025). *Polri Tangkap Mafia Minyak Goreng Bersubsidi*.



- Nelson, G. C., Rosegrant, M. W., Koo, J., Robertson, R., & Sulser, T. (2020). *Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation*. Washington DC: IFPRI.
- Nugroho, A. (2021). *Peran Polri dalam Ketahanan Pangan*. Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Nasional.
- Ortiz-Bobea, A., et al. (2020). Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. *Nature Climate Change*, 10(4), 306–312.
- Parry, M., Canziani, O., & Palutikof, J. (2021). *Climate Change and Food Security*. Geneva: IPCC.
- Purnomo, H. (2021). *Sinergi Polri dan Petani dalam Ketahanan Pangan Lokal*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 145–163.
- Rachman, B. (2021). *Distribusi Pangan dan Tantangannya di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Robinkar Polri. (2024). *Program Ketahanan Pangan Polri Tahun 2025*. Mabes Polri.
- Satgas Pangan Polri. (2025). *Laporan Tahunan Penindakan Pangan Nasional*.
- Smith, J. (2019). *Climate-Induced Food Insecurity in Developing Countries*. New York: Earthwatch.
- Sujatmiko, R. (2021). *Peran Polri dalam Edukasi Ketahanan Pangan*. *Jurnal Sosial Keamanan*, 9(3), 231–246.
- Suryana, A. (2022). *Food Estate dan Ketahanan Pangan Nasional*. Jakarta: Puslitbang Pertanian.
- Timisela, N., Widodo, W., & Dewi, L. (2021). *Tantangan Ketahanan Pangan Pascapandemi*. *Jurnal Gizi dan Ketahanan Pangan Indonesia*, 3(1), 67–79.
- Tribrata News. (2024–2025). *Laporan Program Ketahanan Pangan Polri*. Diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id>
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2021 & 2024 tentang Ketahanan Pangan Nasional.
<https://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id>